

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) lahir sebagai hasil perkembangan cara berpikir dan kebudayaan manusia, yang berakar pada kemampuan akal dan budi. Pemilu juga dipengaruhi oleh pemikiran modern, yang ditandai dengan munculnya aliran rasionalisme dan empirisme pada zaman *Renaissance*.¹ Masa ini memiliki ciri utama berupa pandangan antroposentris, yaitu manusia dengan akalnya memiliki hak dan kebebasan. Pandangan semacam ini membawa pengaruh besar terhadap cara memahami kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai manifestasi kehendak Tuhan (teokrasi) atau hak istimewa yang diwariskan melalui keturunan (monarki). Perspektif antroposentris justru memunculkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkuasa. Kekuasaan dipandang sebagai hak milik bersama yang dapat diakses oleh siapa pun yang memenuhi kriteria. Pemikiran ini kemudian menjadi fondasi pelaksanaan pemilu, dengan prinsip bahwa setiap individu berhak memilih dan dipilih.²

Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintahan dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, sehingga rakyat memiliki hak serta kebebasan dalam menentukan kebijakan negara.

¹ Mohammad Saihu dkk., *Penyelenggara Pemilu di Dunia Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2018), hlm.4.

² *Ibid.*, hlm. 5-6.

Suara dan aspirasi rakyat menjadi penentu utama dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam negara demokrasi, pemilu menjadi salah satu komponen penting. Secara normatif, pemilu di Indonesia dipandang sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Di Indonesia, pemilu dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Indonesia menyelenggarakan pemilu nasional pertamanya pada tahun 1955. Akan tetapi, sebelumnya, pada tahun 1951 telah diadakan pemilu lokal di wilayah Minahasa dan Yogyakarta.⁴ Pemilu tahun 1955 banyak dianggap sebagian kalangan sebagai pemilu yang demokratis dan mendekati ideal. Citra ideal yang terbentuk dalam pemilu ini didasarkan pada adanya kebebasan dan keberagaman peserta pemilu, netralitas birokrasi dan militer setidaknya secara prinsip, tidak adanya kerusuhan atau bentrokan massa, keterwakilan semua partai dalam badan penyelenggaraan pemilu, serta tingginya antusiasme pemilih. Pemilu tahun 1955 dilihat sebagai keberhasilan besar, manifestasi dari semangat kebangsaan, sekaligus bukti konkret bagi pihak-pihak skeptis, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meragukan kemampuan Indonesia menjalankan demokrasi.⁵

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

⁴ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm 89.

⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

Pemilu merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pembentukan masa depan suatu negara dengan harapan pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan serta aspirasi masyarakat. Pemilu bukan hanya sebagai momen untuk menentukan pemimpin berikutnya, tetapi pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi yang merefleksikan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan keputusan-keputusan yang menyentuh atau mempengaruhi aspek kehidupannya.⁶ Partisipasi politik berarti keikutsertaan aktif seseorang atau kelompok dalam kehidupan politik, misalnya melalui pemilihan pemimpin negara atau memengaruhi kebijakan publik (*public policy*), baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷ Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik.

Hak suara memilih dalam pemilu merupakan hak yang diberikan negara kepada warga negaranya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa pemberian suara merupakan hak warga negara yang berhak memilih.⁸ Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 198 ayat (1) disebutkan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992) hlm. 140.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm. 367.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

memilih.⁹ Penggunaan hak suara dalam pemilu adalah wujud dari partisipasi aktif warga negara dalam berpolitik. Dengan mempergunakan hak suara, seluruh warga negara mempunyai peluang yang sama untuk menentukan arah masa depan suatu bangsa serta menjaga keberlangsungan demokrasi.

Pada pemilu Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tahun 2024 menjadi bagian penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Calon kandidat para Capres dan Cawapres yang akan menggantikan pemimpin sebelumnya, membawa visi baru untuk pembangunan negara di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan lainnya untuk Indonesia lima tahun kedepan. Pasangan Calon (Paslon) Capres dan Cawapres pada pemilu 2024, diantaranya adalah: (1) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar; (2) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka; dan (3) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pemilu 2024 merupakan kesempatan untuk memilih Capres dan Cawapres yang dianggap mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan di masa depan. Partisipasi pemilih pada pemilu Capres dan Cawapres 2024 memiliki persentase sebanyak 81,78 persen dengan jumlah 164.227.475 juta suara sah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 melampaui target RPJMN

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2020–2024 sebesar 79,5 persen.¹⁰ Dari total 204,8 juta pemilih pada tahun tersebut, sekitar 25 juta adalah pemilih pemula berusia 17 hingga 25 tahun.¹¹

Dalam kontestasi politik saat ini, pemilih pemula termasuk ke dalam kelompok usia generasi Z. Generasi ini menjadi salah satu kelompok yang juga menjadi perhatian, khususnya pada pemilu 2024. Generasi Z merujuk pada seseorang yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012.¹² Menurut data Sensus Penduduk 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk Indonesia berasal dari generasi Z dan generasi Milenial. Generasi Z sendiri tercatat sebanyak 27,94 persen dari total populasi, atau sekitar 74,93 juta jiwa.¹³ Dominasi jumlah generasi Z ini menjadi semakin signifikan dalam konteks bonus demografi yang dialami Indonesia. Bonus demografi merujuk pada keadaan di mana proporsi penduduk usia produktif melampaui jumlah penduduk usia non-produktif. Di Indonesia bonus demografi diperkirakan berlangsung sepanjang periode 2020 hingga 2035. Pada tahun 2020, BPS mencatat bahwa proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai 70,72 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.¹⁴

¹⁰ Antara, “Tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2024”, *Antaranews*

<https://www.antaranews.com/infografik/4029990/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024>.

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Menteri PPPA Ajak Pemilih Pemula jadi Pemilih yang Cerdas pada Pemilu 2024”,

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA1Nw==>.

¹² Badan Pusat Statistik, “Not in Employment, and Training/NEET Pada Gen Z”, *BPS Kota Tasikmalaya*, <https://tasikmalayakota.bps.go.id/id/news/2024/05/28/321/not-in-employment--education--and-training-neet-pada-gen-z-.html>.

¹³ Badan Pusat Statistik, *Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*, (BPS RI: 2020), hlm. 14,

<https://www.bps.go.id/id/publication/2021/01/21/213995c881428fef20a18226/potret-sensus-penduduk-2020-menuju-satu-data-kependudukan-indonesia.html>.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, “Hasil Sensus Penduduk 2020”,

<https://demakkab.bps.go.id/id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

Salah satu Provinsi yang mengalami bonus demografi lebih awal adalah DKI Jakarta.¹⁵ Menurut data BPS, jumlah generasi Z di DKI Jakarta pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.678.252 jiwa.¹⁶ Dari data tersebut DKI Jakarta termasuk sebagai salah satu provinsi dengan populasi generasi Z yang tinggi. Generasi Z yang merupakan bagian dari kelompok usia produktif berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional, termasuk dalam proses politik seperti pemilu. Besarnya jumlah generasi Z di wilayah urban seperti Jakarta, menjadikan generasi Z sebagai aktor potensial yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dalam konteks pemilu 2024, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menunjukkan bahwa tercatat ada 121.245 pemilih pemula pada pemilu 2024 di Jakarta.¹⁷ Untuk pemilu 2024 kali ini, jumlah pemilih dominan berasal dari Generasi Z dan Milenial yang mencapai persentase sebanyak 55 persen.¹⁸

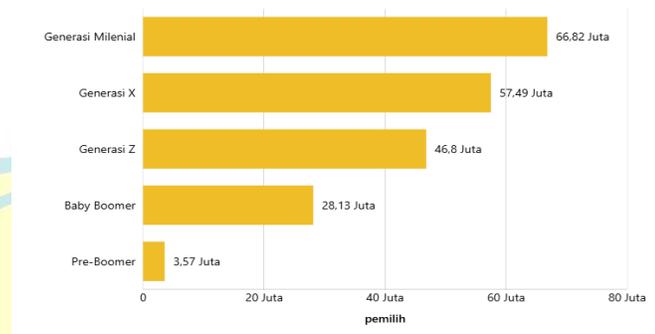
¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Analisis Profil Penduduk Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2022), hlm. 18, <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc557c5f/analisis-profil-penduduk-indonesia.html>.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Indonesia 2020”, *Sensus Penduduk 2020*, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0>.

¹⁷ Putri Anisa Yuliani, “89% Pemilih Pemula di Jakarta Sudah Rekam Data Kependudukan”, *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/649745/89-pemilih-pemula-di-jakarta-sudah-rekam-data-kependudukan>.

¹⁸ KPU, “55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”, *Komisi Pemilihan Umum*, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024>.

Gambar 1.1 Data Jumlah Pemilih Pemilu Berdasarkan Kelompok Usianya, Juli 2023



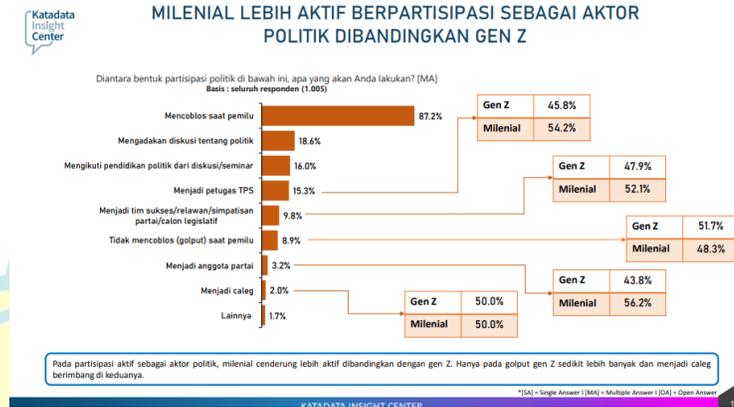
Sumber: KPU dikutip dari Databoks, 2023

KPU mencatat daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 orang. Di antaranya, Generasi Z berjumlah 46,8 juta atau 22,85 persen, sedangkan Generasi Milenial mencapai 66,82 juta atau 33,60 persen. Dengan demikian, mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 didominasi oleh kedua generasi tersebut.¹⁹ Meskipun jumlah generasi Z besar dalam pemilu 2024, partisipasi politik mereka masih terbatas pada aspek formal. Survei Katadata 2023, menunjukkan bahwa sebanyak 87,2 persen anak muda, dengan proporsi Gen Z sebanyak 45,8 persen dan Milenial sebanyak 54,2 persen. Selain itu, yang menyatakan tidak mencoblos (golput) saat pemilu sebanyak 51,7 persen pada Gen Z, dan 48,3 persen pada Milenial.²⁰

¹⁹ Databoks, “KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial”, *Katadata*, <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/faf64350269d0c8/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>.

²⁰ Katadata Insight Center, *Politik Di Mata Anak Muda Persepsi & Kecenderungan Gen Z Milenial Terhadap Capres, Parpol & Kampanye Pemilu 2024*, 2023, hlm. 15, https://cdn1.katadata.co.id/media/files/2023/11/14/2023_11_14-09_29_57_b79a6291bfdc96ed7cbd51505b9ca4d8.pdf.

Gambar 1.2 Data Bentuk Partisipasi Politik Anak Muda

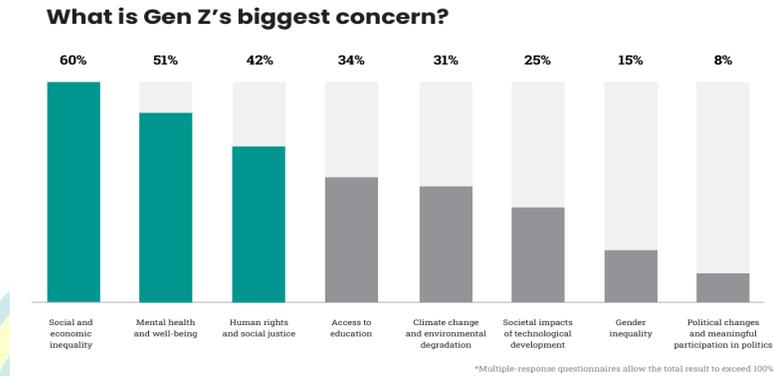


Sumber: Katadata, 2023

Dari survei tersebut juga terlihat bahwa keterlibatan Generasi Z diluar pencoblosan, seperti keinginan berpartisipasi sebagai aktor politik tercatat sangat rendah. Selain itu, dari survei ini juga menunjukkan mayoritas anak muda justru memiliki pandangan negatif terhadap politik. Di pulau Jawa lebih dari separuh anak muda memandang politik merupakan hal yang buruk dengan persentase sebesar 54,7 persen.²¹ Dengan begitu, maka penting pula untuk memahami bagaimana kecenderungan perilaku dan preferensi politik generasi Z. Pemahaman mengenai nilai-nilai sosial generasi Z dapat membentuk preferensi politik dalam menentukan pilihan mereka dalam pemilu 2024.

²¹ *Ibid.*, hlm. 12.

Gambar 1.3 Data Survei Kekhawatiran Terbesar Generasi Z

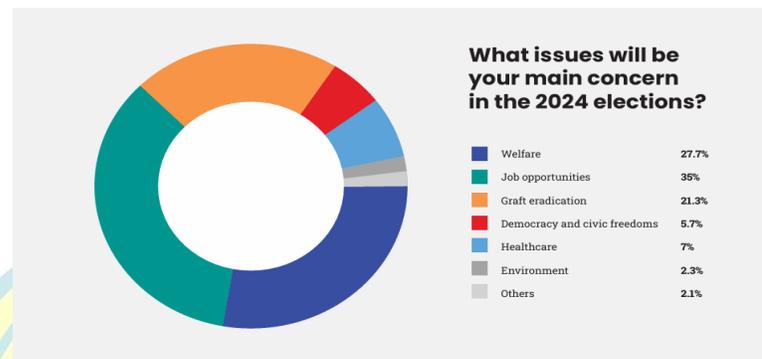


Sumber: IDN Media, 2024

Berdasarkan Indonesia Gen Z Report 2024 yang diterbitkan oleh IDN Media, dari grafik tersebut terlihat yang menjadi perhatian utama generasi Z adalah isu-isu sosial yang berdampak pada kehidupan mereka secara langsung. Berdasarkan grafik tersebut, terdapat tiga isu utama yang menjadi kekhawatiran terbesar mereka. Tiga isu utama yang menjadi sorotan generasi Z adalah ketimpangan sosial dan ekonomi mencapai 60 persen, kesehatan mental dan kesejahteraan sebanyak 51 persen, dan hak asasi manusia dan keadilan sosial dengan persentase 42 persen.²² Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa generasi Z memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi masyarakat secara umum. Dalam konteks pemilu 2024, generasi Z memiliki perhatian utama terhadap isu-isu yang juga berkaitan langsung dengan kondisi sosial ekonomi.

²² IDN Research Institute, *Indonesia Gen Z Report 2024*, hlm. 11, <https://cdn.idntimes.com/content-documents/indonesia-gen-z-report-2024.pdf>.

Gambar 1.4 Data Survei Masalah yang Menjadi Perhatian Utama dalam Pemilu 2024



Sumber: IDN Media, 2024

Isu yang paling banyak dipilih sebagai kekhawatiran utama adalah peluang kerja dengan tingkat persentase 35 persen, hal ini menunjukkan bahwa generasi Z memprioritaskan aspek kestabilan ekonomi dan masa depan mereka. Sebagian generasi Z yang masih berada pada tahap transisi dari pendidikan ke dunia kerja, isu peluang kerja menjadi kekhawatiran mereka ditengah tantangan ketidakpastian ekonomi dan persaingan dalam dunia kerja. Kemudian, isu mengenai kesejahteraan dengan persentase sebesar 27,7 persen yang juga menjadi perhatian generasi Z. Hal ini memperlihatkan bahwa generasi Z peduli terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya adalah isu mengenai pemberantasan korupsi dengan persentase sebesar 21,3 persen yang pula menjadi perhatian utama mereka.²³ Walaupun pada grafik sebelumnya, menunjukkan bahwa generasi Z kurang tertarik pada isu

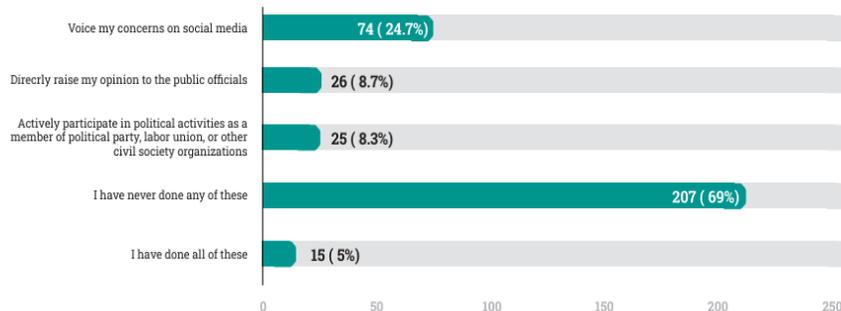
²³ *Ibid.*, hlm. 88.

politik secara langsung, namun mereka tetap memiliki kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan prioritas isu-isu dalam pandangan generasi Z, pola konsumsi mereka juga turut mempengaruhi bagaimana mereka membentuk opini dan mengambil keputusan politik. Berdasarkan data dari Indonesia Gen Z Report 2024, sebanyak 73 persen generasi Z mendapatkan berita melalui media sosial.²⁴ Media sosial sebagai informasi utama yang paling dominan bagi mereka dalam mencari dan mendapatkan informasi. Meskipun generasi Z memiliki aktivitas yang tinggi di media sosial dan memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan sosial dan ekonomi, partisipasi mereka dalam berpolitik secara langsung di media sosial masih tergolong rendah.

Gambar 1.5 Data Survei Generasi Z Membutuhkan Saluran untuk Berpartisipasi Aktif dalam Politik

Gen Z needs channels to actively participate in politics



Sumber: IDN Media, 2024

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

Dalam grafik tentang Generasi Z membutuhkan saluran untuk berpartisipasi aktif dalam politik tersebut, terlihat bahwa sebanyak 69 persen dari mereka menyatakan belum pernah melakukan bentuk partisipasi politik apapun, baik dalam menyuarakan pendapat di media sosial, menyampaikan opini langsung ke pejabat publik, maupun terlibat dalam organisasi atau partai politik.²⁵ Namun, dapat dilihat bahwa keterlibatan generasi Z jauh lebih besar dalam menyuarakan opini politiknya melalui media sosial dibandingkan menyampaikan pendapat secara langsung kepada pejabat publik maupun aktif dalam kegiatan politik melalui partai atau organisasi sipil lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa platform digital sebagai wadah paling umum digunakan untuk mengekspresikan pandangan politik mereka.

Dalam konteks pemilu 2024, generasi Z merupakan bagian dari pemilih pemula. Pemilih pemula adalah individu yang belum pernah menggunakan hak pilihnya pada pemilu sebelumnya, yaitu lima tahun yang lalu. Pemilih pemula merupakan individu yang telah memasuki usia yang memenuhi syarat untuk memilih dan akan memberikan suaranya untuk pertama kali pada pemilu atau pilkada. Umumnya, pemilih pemula berada pada usia 17 hingga 21 tahun, mengikuti siklus pemilu Indonesia yang berlangsung setiap lima tahun. Mereka biasanya berasal dari kalangan mahasiswa, lulusan SMA, atau pekerja muda.²⁶

Salah satu kelompok yang masuk dalam kategori pemilih pemula adalah mahasiswa, terutama mereka yang telah mencapai usia 17 tahun dan telah memenuhi

²⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

²⁶ Komisi Pemilihan Umum, "Pedoman Pendidikan Pemilih", (Jakarta: KPU RI, 2015), hlm. 17.

ketentuan administratif sebagai pemilih. Mahasiswa adalah seseorang yang telah resmi tercatat sebagai peserta perkuliahan di perguruan tinggi, biasanya berusia antara 18 sampai 30 tahun.²⁷ Sebagai seseorang yang sedang menjalani pendidikan tinggi, mahasiswa memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan diskursus politik, baik melalui perkuliahan, organisasi, maupun aktivitas lainnya. Mahasiswa sebagai warga negara yang merupakan generasi muda penerus bangsa memiliki peran yang krusial dalam masyarakat. Sebagai mahasiswa terdapat peran-peran yang melekat pada mereka, salah satunya adalah sebagai *agent of change*, yakni mahasiswa sebagai agen perubahan.²⁸ Mereka mempunyai tugas sebagai penggerak perubahan positif dalam masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, maupun semangat mereka.

Mahasiswa yang merupakan bagian dari pemilih pemula sebagai kelompok baru yang berpartisipasi dalam proses demokrasi, pemilih pemula dapat signifikan mempengaruhi jumlah suara. Pemilih pemula mencakup pemuda yang sudah memasuki usia 17 tahun hingga 21 tahun, yang sedang berada dalam masa peralihan dari remaja ke dewasa. Pada masa-masa tersebut mereka sedang berada pada pencarian identitas diri. Identitas, nilai, dan preferensi politik mereka sedang berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, sosial, bahkan pengaruh media sosial. Mereka sebagai pemilih pemula belum memiliki banyak pengalaman

²⁷ Harfun Gafur, "Mahasiswa & Dinamika Dunia Kampus", (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2015), hlm. 17.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

dalam dunia politik. Pemilih pemula dapat membawa perspektif atau pandangan baru yang mungkin berbeda dari generasi sebelumnya.

Pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula dapat berdampak pada kualitas keputusan mereka dalam memilih. Kelompok pemilih pemula yang termasuk Generasi Z adalah mereka yang tumbuh dalam generasi yang sudah memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi. Mereka dapat mudah sekali untuk mendapatkan informasi terkait para kandidat secara cepat melalui internet dan media sosial. Dalam pemilu 2024, media sosial dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjalankan kampanye politik secara modern. Kemudahan dalam mengakses berbagai informasi, paparan kampanye di media sosial, dan pengaruh lingkungan keluarga serta lingkungan sosial menjadi preferensi mereka untuk menentukan penggunaan hak suaranya.

Menurut teori pilihan rasional James Coleman, setiap tindakan individu didasarkan pada tujuan tertentu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai atau preferensi yang dimilikinya.²⁹ Teori ini dapat membantu peneliti untuk menganalisis dan memahami tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu tindakan dari pemilih pemula dalam menentukan keputusannya memilih pemimpin bangsa. Pendekatan ini dapat menjelaskan tindakan pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman berpolitik untuk pertama kali mempergunakan hak suaranya. Bagaimana tindakan tersebut dibentuk oleh tujuan tertentu maupun nilai-nilai yang diyakini.

²⁹ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, dialihbahasakan Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 394.

Penelitian ini berfokus pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta sebagai subjek penelitian, yang merupakan pemilih pemula pada Pemilihan Presiden 2024. Hal ini tidak terlepas dari peran mahasiswa sebagai generasi muda dan penerus bangsa yang memiliki akses luas terhadap informasi serta diskusi politik, baik lewat perkuliahan, organisasi, jaringan pertemanan, maupun aktivitas di media sosial. Dari hal-hal tersebut, mahasiswa dapat memiliki pemikiran yang kritis dan memiliki tingkat literasi politik yang berbeda-beda. Pemilihan subjek ini juga didukung oleh data dari BPS bahwa DKI Jakarta termasuk sebagai salah satu provinsi dengan populasi generasi Z yang tinggi dan merupakan salah satu provinsi yang mengalami bonus demografi lebih awal. Kemudian, jumlah pemilih pemula di DKI Jakarta yang signifikan berdasarkan data dari Dukcapil.

Dalam konteks ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta menjadi representasi yang relevan untuk dikaji, karena mereka bukan hanya bagian dari kelompok generasi Z, tetapi juga memiliki akses terhadap pendidikan tinggi dan wawasan sosial-politik yang relatif lebih luas. Lokasi kampus yang berada di wilayah ibu kota dan sebagai pusat pemerintahan memberikan konteks relevan dengan mahasiswa yang lebih sering terekspos pada isu-isu politik. Sehingga perilaku dan rasionalitas mereka dalam memilih dapat mempresentasikan dinamika pemilih pemula yang berpendidikan. Oleh karena itu, menjadikan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta sebagai subjek penelitian tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis dalam melihat gambaran pemilih pemula pada konteks sosial-politik di wilayah urban.

Dengan mempertimbangkan besarnya populasi generasi Z di DKI Jakarta dan posisi mahasiswa sebagai bagian dari kelompok pemilih pemula yang terdidik serta dekat dengan lingkungan sosial-politik, penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana generasi muda, khususnya mahasiswa pemilih pemula membentuk keputusan politiknya dalam memilih calon pemimpin negara. Mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia, tetapi juga merepresentasikan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan praktik demokrasi di masa depan. Oleh karena itu, memahami pola pikir, nilai, dan pertimbangan rasional mahasiswa dalam menggunakan hak pilihnya juga dapat memberikan gambaran kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam memahami dinamika pemilih pemula, yang merupakan elemen penting dalam pemilu karena jumlahnya yang besar dan potensinya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Penelitian ini untuk mengkaji rasionalitas pemilih pemula, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan politik pemilih pemula dan melihat analisisnya menggunakan teori pilihan rasional. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Suara pada Pilpres 2024 Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta”**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda yang berasal dari Generasi Z dan Milenial. Pemilih pemula menjadi

bagian penting dalam pemilu kali ini, karena proporsinya yang besar dan mereka mewakili generasi muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Mereka tumbuh dalam konteks sosial-politik serta teknologi informasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Sebagai bagian dari populasi pemilih, pemilih pemula seringkali memiliki semangat partisipasi yang tinggi namun terkadang dihadapkan pada kurangnya pengalaman dalam memahami dinamika politik. Kondisi ini menjadikan proses pengambilan keputusan politik mereka sebagai sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Dalam konteks tersebut, perlu untuk melihat lebih jauh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan rasionalitas pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya, bagi dari segi informasi yang mereka akses, lingkungan sosial, maupun nilai-nilai pribadi yang mereka pegang. Selain itu, hal tersebut dapat dianalisis dengan teori pilihan rasional yang memandang individu sebagai aktor yang secara sadar mempertimbangkan untung dan rugi dalam setiap keputusan yang diambil. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan memilih mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta sebagai subjek penelitian, untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana rasionalitas politik mereka dibentuk dan dijalankan.

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan rasionalitas pemilih pemula dalam menentukan pilihannya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024?

2. Bagaimana bentuk rasionalitas pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ditinjau melalui teori pilihan rasional?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan rasionalitas pemilih pemula dalam menentukan pilihannya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
2. Untuk menggambarkan bagaimana bentuk rasionalitas pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ditinjau melalui teori pilihan rasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang rasionalitas politik generasi muda dan memperdalam pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta memperkaya kajian dalam ilmu sosiologi politik terutama dalam hal pengambilan keputusan politik pemilih pemula melalui pendekatan teori pilihan rasional. Selain itu, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji penelitian serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu secara rasional dan bertanggung jawab. Temuan dari penelitian ini memberikan gambaran bagaimana proses berpikir dan pengambilan keputusan politik dilakukan oleh pemilih pemula, sehingga dapat menjadi refleksi bagi masyarakat umum dalam menilai dan mengembangkan sikap politik yang lebih kritis dan objektif.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pendidikan politik bagi generasi muda. Informasi mengenai pola pikir dan pertimbangan rasional pemilih pemula dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi komunikasi publik yang lebih efektif, serta kampanye pemilu yang lebih edukatif dan inklusif.
3. Bagi lembaga terkait, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang demokrasi dan partisipasi politik. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan dalam menyusun program literasi politik, serta penguatan kapasitas generasi muda dalam memahami hak dan tanggung jawab politiknya sebagai warga negara.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Pada penelitian ini, peneliti meninjau beberapa literatur atau penelitian sejenis yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menelaah 7 jurnal nasional, 5 jurnal internasional, 3 buku, dan 1 tesis yang membahas perilaku pemilih, karakteristik pemilih pemula, partisipasi pemilih pemula, dan peran media sosial bagi pemilih pemula. Peninjauan ini dilakukan untuk memperjelas posisi penelitian, menghindari plagiarisme, dan menemukan celah dari penelitian terdahulu yang belum dikaji. Literatur yang digunakan menjadi dasar untuk memperkuat analisis dan memperluas pemahaman dalam penelitian ini.

Peneliti membuat beberapa kategori untuk mengelompokkan penelitian sejenis yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Kategori *pertama*, tentang pemilih pemula dan perilaku memilih. Dalam kategori ini peneliti menggunakan tinjauan literatur dari artikel yang berjudul “Perilaku Memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang Tahun 2020” oleh Lalu Agsal Fazalani dan Joko J. Prihatmoko tahun 2022. Artikel ini meneliti tentang sejauh mana pemilih pemula di Kota Semarang terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pilkada 2022. Penelitian ini menemukan bahwa pemilih pemula di Kota Semarang termasuk dalam kategori pemilih rasional, yaitu dalam menentukan pilihannya mereka mempertimbangkan kinerja masa lalu atau visi dan misi yang ditawarkan oleh calon.³⁰

³⁰ Lalu Agsal Fazalani, Joko J. Prihatmoko, “Perilaku Memilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang Tahun 2020”, *Jurnal Lanskap Politik*, Vol. 01, No. 02, 2022.

Artikel kedua berjudul “Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado di Kecamatan Sario Kota Manado” oleh Jacob Reigen Wallah, Ventje Tamowangkay, dan Marlien T. Lopian pada tahun 2022. Penelitian ini untuk mengetahui perilaku memilih pemula di lokasi tersebut. Temuan hasil penelitian bahwa pemilih pemula lebih dominan dalam pendekatan sosiologis dibandingkan dengan menggunakan pendekatan psikologis, pemilih pemula cenderung melihat latar belakang demografi dan sosial ekonomi calon kandidat.³¹

Artikel ketiga berjudul “Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya” oleh Amanda Prasetyawati dan Agus Satmoko Adi tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku politik pemilih pemula dalam pilkada 2020 selama masa pandemi Covid-19 di lokasi penelitian. Temuan penelitian mengungkap bahwa pemilih pemula menunjukkan tingkat orientasi ideologi dan orientasi *policy problem solving* yang sama-sama tinggi terhadap para kandidat.³²

Artikel keempat merupakan jurnal internasional berjudul “Beyond The Binary: Examining Dynamic Youth Voter Behavior in South Africa” oleh Martin Baker, Carin Runciman, dan Benjamin Roberts pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji dinamika pemilih muda di Afrika Selatan pada LGE 2021 dan memberikan analisis pemilih muda

³¹ Jacobus Reigen Wallah, Ventje Tamowangkay, Marlien T. Lopian, “Perilaku Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado di Kecamatan Sario Kota Manado”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 2, 2022.

³² Amanda Prasetyawati, Agus Satmoko Adi, “Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya”, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2, 2021.

selama tiga siklus pemilu terakhir. Pada penelitian ini, di Afrika Selatan, pemilih muda menunjukkan fluiditas yang tinggi dengan berganti antara memilih, abstain, dan berpindah partai. Penelitian ini memakai pendekatan yang mencakup kategori seperti pemilih loyal, pemilih biasa, dan abstain konsisten. Meski fokusnya pada pemilih muda.³³

Artikel kelima juga merupakan jurnal internasional yang berjudul “Social Media Political Information Use and Voting Behavior of the Malaysian Youth” oleh Tan Jue Jun pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana kaum muda yang terhubung dengan internet, menggunakan media sosial untuk belajar tentang politik dan mengamati pemungutan suara. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan informasi politik media sosial tidak mendorong anak muda untuk lebih memilih, tetapi mengalihkan perhatian mereka dari tugas sebagai pemilih. Sebaliknya, perilaku memilih lebih mungkin diprediksi oleh variabel politik seperti afiliasi partai dan minat politik.³⁴

Artikel keenam merupakan jurnal internasional, yang berjudul “Activating effects of elections: changes in young voters’ political engagement over the course of an election year” oleh Katharina Eckstein, Marta Miklikowska, Jan Serek, Peter Noack, Astrid Koerner tahun 2024. Penelitian ini mengkaji efek pengaktifan pemilu nasional

³³ Martin Bekker, Carin Runcieman, Benjamin Roberts, “Beyond The Binary: Examining Dynamic Youth Voter Behavior in South Africa”, *South African Journal of Political Studies*, Vol. 49, No. 4, 2022.

³⁴ Tan Jue Jun, “Social Media Political Information Use and Voting Behavior of the Malaysian Youth”, *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 7, No. 9, 2022.

di Jerman, Republik Ceko, dan Swedia tentang partisipasi pemilih muda dalam keterlibatan politik. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa politik besar seperti pemilu nasional dapat memiliki efek yang mengaktifkan keterlibatan politik muda.³⁵

Artikel ketujuh masih merupakan jurnal internasional yang berjudul “Youth Voter Perception of Political Parties” oleh Teguh Setyawan Santoso pada tahun 2021. Penelitian ini melihat bagaimana persepsi pemilih muda terhadap partai politik, dengan menggali sejauh mana dinamika politik mempengaruhi pemilih muda terhadap partai politik. Kemudian dalam penelitian ini juga memahami sejauh mana antusiasme pemilih muda terhadap pemilu mencerminkan pemahaman mereka yang substansial terhadap proses politik secara keseluruhan.³⁶

Artikel kedelapan merupakan jurnal internasional yang berjudul “Social Media as an Online Public Sphere: A Study Among the First-Time Malay Voters” oleh Mohd Faizal Kasmani tahun 2024. Artikel ini menyelidiki aspek interaksi antara pemilih muda dan “ruang publik” media sosial. Dalam artikel ini menelaah platform yang mereka gunakan untuk berkomunikasi tentang politik, bagaimana mereka memahami politik, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial.³⁷

³⁵ Katharina Eckstein, et.al, “Activating effects of elections: changes in young voters’ political engagement over the course of an election year”, *Frontiers in Political Science*, Vol. 6, 2024.

³⁶ Teguh Setyawan Santoso, “Youth Voter Perception of Political Parties”, *International Journal on Social Science, Economics, and Art*, Vol. 11, No. 3, 2021.

³⁷ Mohd Faizal Kasmani, “Social Media as an Online Public Sphere: A Study Among the First-Time Malay Voters”, *Kajian Malaysia*, Vol. 42, No. 2, 2024.

Kemudian, dalam kategori ini peneliti juga mengambil literatur yang bersumber dari buku yang berjudul “Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada” oleh Alfrid Sentosa, Betty Karya tahun 2022. Buku ini membahas bagaimana pemilih menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan tanggung jawab dari jabatan dan pekerjaan calon pemimpin. Selain itu, faktor usia juga dijadikan indikator dalam proses pengambilan keputusan, begitu pula dengan tingkat pendidikan yang dianggap penting dalam menilai kemampuan kepemimpinan. Pemilih umumnya cenderung memilih berdasarkan figur atau sosok yang mereka kagumi. Selain itu, keputusan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, antara lain agama, daya tarik terhadap sosok tertentu, kondisi sosial, serta adanya manipulasi dari para elit politik.³⁸

Buku selanjutnya berjudul “Perilaku Pemilih Teori dan Praktek” oleh Syafhendry tahun 2016. Buku ini membahas berbagai teori dan pendekatan mengenai perilaku pemilih dalam konteks pemilihan umum dengan mengkaji perkembangan politik di Indonesia. Buku ini menganalisis faktor faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih, seperti aspek psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam pemilihan umum.³⁹

Terdapat pula buku yang berjudul “Youth Voter Participation: Involving Today’s Young in Tomorrow’s Democracy” oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) tahun 1999. Buku ini membahas

³⁸ Alfrid Sentosa, Betty Karya, *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada*, (Jakarta: NEM, 2022).

³⁹ Syafhendry, *Perilaku Memilih Teori dan Praktek*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2016).

membahas pentingnya partisipasi pemuda dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilu. Buku ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam melibatkan pemuda sebagai pemilih, mengingat tren rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pemilu di berbagai negara.⁴⁰

Kategori *kedua*, mengenai mahasiswa sebagai pemilih, dalam kategori ini peneliti menggunakan literatur dari artikel yang berjudul “Analisis Voting Behavior Gen-Z pada Pemilu 2024 dan Pengaruh Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045: Studi Kasus Mahasiswa Kota Surabaya” oleh Muhammad Rici Nur Ardiansyah, Dieva Ratu Ariesta, Sanindita Qolbiyah Hariroh, Sindi Ayu Antika, Salwa Dwi Maharani, Binti Azizatun Nafi’ah tahun 2024. Penelitian ini dilakukan untuk melihat partisipasi politik mahasiswa serta dampak perilaku memilih mereka terhadap terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mahasiswa Generasi Z sangat memperhatikan visi, misi, kredibilitas, dan rekam jejak para calon.⁴¹

Artikel selanjutnya berjudul “Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dalam Menghadapi Pilpres 2024” oleh Syarifah Nadya Al Hindwan, Nora Eka Putri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana media sosial memengaruhi partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian

⁴⁰ IDEA, *Youth Voter Participation: Involving Today's Young in Tomorrow's Democracy*, (International IDEA, 1999).

⁴¹ Muhammad Rici Nur Ardiansyah, dkk, “Analisis Voting Behavior Gen-Z pada Pemilu 2024 dan Pengaruh Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045: Studi Kasus Mahasiswa Kota Surabaya”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2024.

menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk gagasan pemilih pemula.⁴²

Kategori *ketiga*, tentang pilihan rasional, dalam kategori ini peneliti menggunakan literatur dari artikel yang berjudul “Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman” oleh Nila Sastrawati pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tindakan individu menggunakan teori pilihan rasional. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tindakan politik dilihat dari perspektif pilihan rasional, dengan menyoroti pengaruh unsur-unsur utama tindakan rasional terhadap perilaku politik individu.⁴³

Selanjutnya adalah artikel yang berjudul “Karakteristik Pilihan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Sidoarjo” oleh Pameliana Putri, Maya Mustika Kartika Sari tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemilu yang didominasi oleh pemilih pemula serta ditinjau dari karakteristik pilihan politiknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi pertama karakteristik pilihan pemilih pemula berdasarkan latar belakang pendidikan kandidat. Pemilih pemula termasuk ke dalam pemilih yang kritis. Dalam melihat karakteristik pilihan pemula di penelitian dengan menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman.⁴⁴

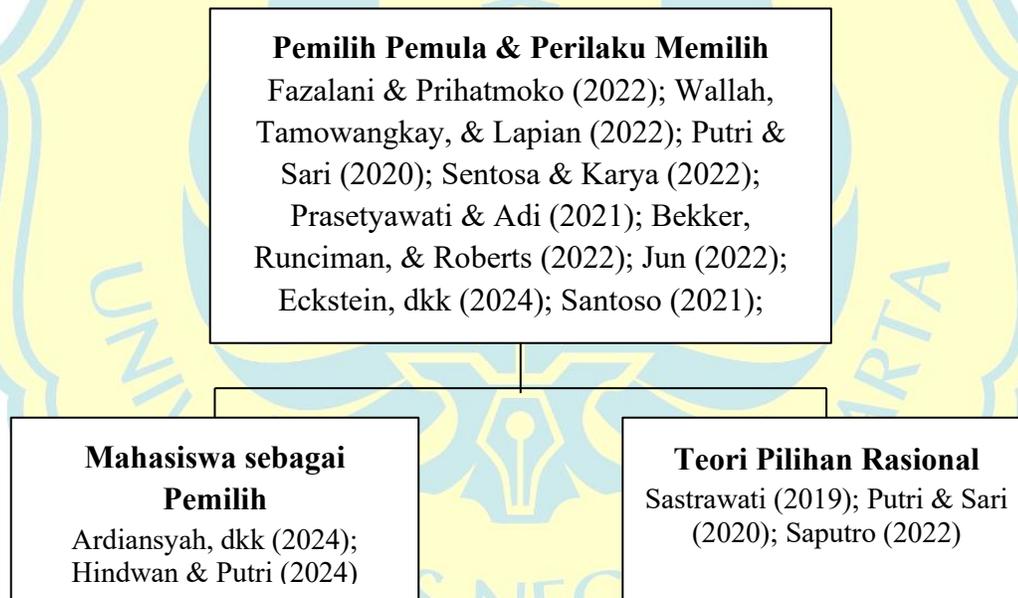
⁴² Syarifah Nadya Al Hindwan, Nora Eka Putri, “Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dalam Menghadapi Pilpres 2024”, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2024.

⁴³ Nila Sastrawati, “Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman”, *Al Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2019.

⁴⁴ Pameliana Putri, Maya Mustika Kartika Sari, “Karakteristik Pilihan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Sidoarjo”, *Journal of Civic and Moral Studies*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Kemudian, terakhir adalah tesis berjudul “Efek Konten Media Sosial Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula di Kota Makassar tahun 2020” oleh Eko Rachmat Saputro tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh konten media sosial terhadap generasi muda pada pemilihan walikota dan wakil walikota di Makassar, dengan mengidentifikasi konten-konten yang memengaruhi keputusan pemilih pemula, menggunakan analisis teori rational choice.⁴⁵

Skema 1.1 Kategorisasi Penelitian Sejenis



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

⁴⁵ Eko Rachmat Saputro, “Efek Konten Media Sosial Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula di Kota Makassar tahun 2020”, Tesis (Universitas Hasanuddin Makassar), 2022.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah salah satu mekanisme demokrasi yang dilaksanakan secara berkala untuk memilih individu yang akan menduduki posisi-posisi politik tertentu. Sesuai dengan UUD 1945, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum diyakini sebagai metode yang paling aman dalam pergantian kekuasaan, karena mekanisme dan hasil dari pemilu tersebut berdasarkan dari aspirasi rakyat yang menjadikan pemilu seringkali dianggap sebagai fondasi utama dari sebuah negara demokrasi.⁴⁶

Melalui mekanisme ini, pemilu dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk membujuk dan mempengaruhi rakyat secara persuasif. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai cara seperti retorika, komunikasi massa, kampanye politik, dan berbagai aktivitas serupa lainnya untuk menarik dan mendapatkan dukungan publik.⁴⁷ Secara konseptual, pemilu menjadi wujud nyata dari sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat diberikan kekuasaan dan hak pilihnya untuk menghendaki siapa individu yang akan memimpin negaranya. Dalam hal ini, mereka memiliki kebebasan penuh untuk

⁴⁶ Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar, "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum", *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 91.

⁴⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1.

menentukan pilihan terhadap individu yang dianggapnya paling layak dan sesuai untuk memimpin.

Peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilihan umum diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Undang-undang ini menjadi landasan utama yang mengatur berbagai aspek dalam pemilu, mulai dari tahapan penyelenggaraan, mekanisme pemungutan suara, hingga pengawasan dan penyelesaian perhitungan. Keberadaan peraturan ini dijadikan sebagai pedoman guna menjamin pelaksanaan pemilu secara transparan, jujur, dan adil. Hal tersebut bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai demokrasi serta memastikan keterlibatan rakyat secara merata dan adil dalam menentukan kepemimpinan negara.

Sesuai dengan *Institute For Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), terdapat beberapa indikator pemilu demokratis yang diakui secara internasional.⁴⁸ Kelima belas indikator yang menjadi alat ukur standar internasional dalam pelaksanaan Pemilu, yaitu:

1. Penyusunan kerangka hukum
2. Sistem Pemilu
3. Penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit Pemilu
4. Hak memilih dan untuk dipilih
5. Badan pelaksana Pemilu

⁴⁸ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk. *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2003), hlm. 3.

6. Pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar
7. Akses kertas suara partai politik dan kandidat
8. Kampanye Pemilu demokratis
9. Akses media dan kebebasan berekspresi
10. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
11. Pemungutan suara
12. Perhitungan dan tabulasi suara
13. Peranan wakil partai dan kandidat
14. Pemantauan Pemilu
15. Kepatuhan dan penegakan hukum

Indikator-indikator tersebut menjadi pedoman penting dalam menilai sejauh mana suatu pemilu di negara memenuhi standar internasional yang berlaku secara universal. Setiap indikator ini bukan hanya berfungsi sebagai acuan teknis, akan tetapi juga menjadi tolak ukur yang memastikan pemilu berjalan dengan asas-asas keadilan, transparansi, dan inklusivitas. Pemantauan pemilu dan penegakan hukum merupakan sebuah elemen krusial yang menjamin integritas proses pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran yang beresiko mematahkan kepercayaan publik. Penerapan indikator-indikator ini secara konsisten menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang kredibel dan demokratis.

Dalam kapasitasnya sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menentukan enam tolok ukur pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Indikator ini tertulis dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang dalam undang-undang tersebut mempunyai beberapa indikator turunan lain seperti transparan, akuntabel, profesional, dan tertib. Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang terus membangun sistem demokrasi dengan cara merekrut penyelenggara pemilu yang bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang bersifat independen.⁴⁹ Proses ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara serta memperkuat sistem pemerintahan yang responsif sesuai dengan kebutuhan rakyat.

1.6.2 Pemilih Pemula

Pemilih dalam konteks pemilihan umum memiliki beberapa definisi. Pemilih dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis. Pertama, pemilih rasional, yaitu mereka yang menentukan pilihan terhadap partai politik berdasarkan pertimbangan dan analisis yang matang. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang berpegang teguh pada prinsip idealisme dan cenderung menolak kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yaitu individu yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya karena baru mencapai usia yang memenuhi syarat

⁴⁹ Abdul Masri Purba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas", *Jurnal Publik Reform Undhar Medan*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 38.

sebagai pemilih.⁵⁰ Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 198 ayat (1) disebutkan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, pada Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022 Pasal 4 juga dijelaskan WNI dapat terdaftar sebagai pemilih, yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Pemilih pemula ialah mereka yang berusia antara 17 hingga 21 tahun, telah memiliki hak suara, tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan baru pertama kali mengikuti pemilu, baik legislatif maupun presiden.⁵¹ Pemilih pemula berdasarkan usianya, berada pada tahap perkembangan remaja menuju dewasa. Sebagai remaja, pemilih pemula memiliki karakteristik sebagai individu yang berada dalam masa pencarian identitas, emosi yang belum stabil dan mudah dipengaruhi.⁵² Pemilih pemula memiliki potensi membuat massa yang bersifat mengembang, dengan artian dapat menentukan menang atau tidaknya kandidat atau partai tertentu dalam pertarungan perolehan suara. Masa

⁵⁰ Ahmad Nurcholis, Tri Rizki Putra, "Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019: Studi Mahasiswa FISIPOL UGM" *Jurnal PolGov*, Vol. 2, No. 1, 2020.

⁵¹ Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

⁵² Santrock, John W, *Life - Span Development: Perkembangan Masa Hidup Jilid 1*, Alih Bahasa Chusairi, (Jakarta: Erlangga, 1995).

mengembang ini, merujuk pada kelompok masyarakat yang menjadi target perebutan suara oleh para partai politik atau kandidat dalam pemilihan umum.⁵³

1.6.3 Mahasiswa

Mahasiswa pada umumnya diartikan sebagai seseorang yang tengah menempuh studi di perguruan tinggi. Kata *mahasiswa* terdiri atas dua bagian, yaitu *maha* yang berarti besar, dan *siswa* yang berarti seseorang yang sedang menempuh pendidikan.⁵⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, mahasiswa didefinisikan sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.⁵⁵ Mahasiswa juga memiliki berbagai peran dalam kehidupan masyarakat. Pertama, mahasiswa berperan sebagai *direct of change*, yakni mahasiswa mampu melakukan perubahan langsung karena jumlah SDM yang besar. Kedua, peran mereka sebagai *agent of change* atau agen perubahan, mahasiswa menjadi salah satu sumber atau kekuatan utama dalam mendorong perubahan dalam masyarakat. Ketiga, mahasiswa berperan sebagai *iron stock*, artinya mereka merupakan cadangan sumber daya manusia yang tidak akan pernah habis. Keempat, peran mahasiswa sebagai *moral force* atau kekuatan moral, mahasiswa di pandangan sebagai individu yang memiliki kekuatan moral yang tinggi. Kelima, perannya sebagai *social control* atau kontrol sosial,

⁵³ Alfrid Sentosa, Betty Karya, *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada*, (Jakarta: NEM, 2022), hlm. 3.

⁵⁴ Harfun Gafur, "Mahasiswa & Dinamika Dunia Kampus", (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2015), hlm. 15.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat.⁵⁶

Mahasiswa memiliki sejumlah peran penting dalam masyarakat, di antaranya terdapat tiga peran utama. Pertama, peran moral, yaitu mahasiswa diharapkan memiliki tanggung jawab moral terhadap dirinya sendiri sebagai individu yang mampu menjalani kehidupan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Kedua, peran sosial, yakni keberadaan mahasiswa dan aktivitas yang mereka lakukan seharusnya memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Ketiga, peran intelektual, di mana mahasiswa dengan kapasitas intelektual yang dimilikinya harus mampu mewujudkan status tersebut dalam kehidupan nyata. Melalui ilmu pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama menempuh pendidikan, mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.⁵⁷

Dalam kehidupan berpolitik, mahasiswa memiliki dua bentuk sumber daya yang dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam proses politik. Pertama, adalah ilmu pengetahuan, watak ilmiah yakni kritis dan objektif dengan pengetahuan yang sistematis mengenai masalah yang menjadi bidang spesialisasinya, dapat mendorong mahasiswa untuk menilai dan bersikap mengenai kehidupan politik di sekitarnya. Kedua, adalah sikap idealisme ini

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 25-26.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 26-27.

merupakan ciri khas dari diri mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang masih bebas dari ikatan struktur kekuasaan. Kolaborasi antara kebebasan struktur dengan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang cita-cita atau harapan, ide atau pikiran politik serta kemasyarakatan yang tertuang di dalam ideologinya, membuat mahasiswa memiliki sikap idealisme.⁵⁸

Mahasiswa dalam sejarah dunia politik Indonesia memiliki peran yang besar sebagai agen perubahan, seperti dalam peristiwa Tritura, Trisakti, Supersemar, hingga peristiwa penggulingan rezim otoriter, mahasiswa mengambil pergerakan sosial penting dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Namun, pada zaman sekarang ini kesadaran politik mereka dapat mudah terkikis akibat dari modernisasi dan globalisasi. Mereka dapat menjadi acuh dan apatis pada kondisi keadaan negara ini. Oleh karena itu, kesadaran politik mereka perlu ditingkatkan mengingat mahasiswa memiliki sifat netral atau bebas nilai dalam pergerakannya. Mahasiswa mempunyai peran yang strategis antara rakyat dan pemerintahan. Fungsi mereka sebagai kontrol sosial disini sangat efektif jika dijalankan oleh mahasiswa yang memiliki posisi strategis. Posisi strategis tersebut, juga berlaku dalam memilih calon pemimpin negara. Dalam hal ini, mahasiswa dapat berperan sebagai agen edukasi bagi masyarakat supaya tidak terjerumus ke dalam praktik *money politic* saat kampanye.⁵⁹

⁵⁸ Abdullah Muzakar, *Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Karl Marx*, (Lombok: Yayasan Suluh Rinjani, 2019), hlm. 120.

⁵⁹ Harfun Gafur, *op.cit.*, hlm.29.

1.6.4 Perilaku Memilih

Ramlan Surbakti menyebut bahwa perilaku memilih adalah aktivitas individu dalam menentukan pilihan melalui pemberian suara, yang terkait dengan keputusan untuk memilih atau tidak memilih pada saat pemilu.⁶⁰ Huntington dan Nelson 1990, mendefinisikan perilaku memilih sebagai bagian dari aktivitas elektoral, yang mencakup tindakan seperti memberikan suara, membantu kegiatan kampanye, terlibat dalam pelaksanaan pemilu, menggalang dukungan untuk kandidat tertentu, atau berbagai tindakan lain yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya proses pemilihan umum.⁶¹ Menurut Jack Plano (1985), perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang bersifat terbuka.⁶²

Dalam kerangka tipologi pemilih, terdapat dua orientasi penting, yaitu *policy-problem-solving* dan *ideology*. Pemilih dengan orientasi *policy-problem-solving* cenderung fokus pada kemampuan partai atau kandidat dalam menawarkan solusi nyata melalui program kerja konkret untuk menyelesaikan masalah. Mereka biasanya memilih secara objektif kandidat atau partai yang responsif terhadap isu-isu nasional dan memiliki kebijakan yang jelas, serta menghindari yang tidak memiliki arah kebijakan yang tegas. Di sisi lain,

⁶⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 145.

⁶¹ Huntington, et.al, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

⁶² Jack C. Plano, Robert E. Riggs, Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

pemilih dengan orientasi *ideology* lebih menekankan pada kesamaan nilai-nilai subjektif, seperti budaya, agama, moral, norma, emosi, dan karakter psikografis. Semakin kuat keselarasan ideologi dengan partai atau kandidat, semakin tinggi dukungan yang diberikan. Kedua orientasi ini dapat dilihat dari tinggi-rendahnya faktor orientasi dalam klasifikasi pemilih.⁶³

1. Pemilih Rasional

Tipe *rational voter* ditandai dengan tingginya orientasi terhadap penyelesaian masalah (*policy-problem-solving*) dan rendahnya orientasi pada ideologi. Pemilih dalam kategori ini lebih menilai partai atau kandidat berdasarkan program kerja yang solutif daripada latar belakang ideologis. Mereka menilai kinerja masa lalu (*backward-looking*) dan rencana ke depan (*forward-looking*) partai atau kandidat, dengan fokus pada reputasi dan kemampuan menyelesaikan isu nasional seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan. Pemilih ini cenderung logis, tidak terikat pada ideologi, budaya, atau tradisi, dan akan berpindah dukungan jika partai atau kandidat dinilai gagal.

2. Pemilih Kritis

Pemilih kritis menggabungkan orientasi tinggi terhadap ideologi dan kemampuan partai atau kandidat dalam menyelesaikan masalah bangsa. Loyalitas mereka cenderung kuat, namun tetap kritis terhadap

⁶³ Syafhendry, *Perilaku Memilih Teori dan Praktek*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2016), hlm. 70-75.

kebijakan yang diambil. Proses terbentuknya pemilih ini dapat dimulai dari keselarasan ideologis yang diikuti dengan evaluasi kebijakan, atau sebaliknya, ketertarikan pada program kerja yang akhirnya membawa pemahaman ideologi partai. Ketika kebijakan partai bertentangan dengan ideologi, pemilih dapat memberikan kritik internal, mengalami frustrasi, atau bahkan memicu pembentukan partai baru dengan nilai ideologi serupa. Ketika, kritiknya tidak difasilitasi, pemilih kritis akan menyuarakan kritiknya melalui media massa.

3. Pemilih Skeptis

Pemilih skeptis tidak memiliki ikatan ideologis atau kepedulian terhadap kebijakan partai politik maupun kandidat, sehingga keterlibatan mereka dalam pemilu sangat rendah. Kelompok ini seringkali menjadi bagian terbesar dari golongan putih (golput), jika berpartisipasi, cenderung memilih secara acak. Mereka merasa bahwa siapapun yang terpilih tidak akan membawa perubahan yang diharapkan, mencerminkan ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Tingginya jumlah pemilih skeptis dapat menurunkan legitimasi hasil pemilu, memicu klaim ketidakrepresentatif, dan mengancam stabilitas nasional.

Dalam konsep perilaku memilih terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Terdapat beberapa pendekatan utama dalam perilaku memilih, seperti pendekatan sosiologis (*social structural*) dan pendekatan pilihan

rasional.⁶⁴ Jenis pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap proses pengambilan keputusan politik pemilih pemula.

1. Pendekatan sosiologis atau *social structural*

Pendekatan ini menjelaskan perilaku memilih secara mikro dan makro. Model mikro, melihat bagaimana kehidupan sehari-hari seseorang mempengaruhi pilihan politiknya. Pemilih dipengaruhi oleh lingkaran sosial tempat seseorang berada, seperti keluarga, teman, lingkungan kerja, agama, atau komunitasnya. Setiap lingkaran sosial ini memiliki aturan dan norma tertentu yang cenderung membentuk keputusan pemilih, karena orang ingin merasa diterima dan hidup damai dalam lingkungannya. Sementara pada model makro, mengamati perilaku pemilih secara lebih luas di seluruh lapisan masyarakat.

2. Pendekatan pilihan rasional

Pendekatan ini berfokus pada analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Menurut pendekatan pilihan rasional, keputusan pemilih tidak ditentukan oleh keterikatan sosial struktural atau loyalitas kuat terhadap partai, melainkan oleh penilaian rasional dari individu yang mampu berpikir kritis. Pilihan pemilih rasional cenderung didasarkan pada hasil yang telah dicapai atau diharapkan dari partai atau kandidat

⁶⁴ Syafhendry, *op.cit.*, hlm. 94-111.

tertentu, baik berdasarkan persepsi masa lalu maupun prediksi masa depan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan pilihan rasional, serta tipologi pemilih rasional, kritis, dan skeptis. Penggunaan pendekatan dan tipologi ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap perilaku memilih pemilih pemula. Pendekatan sosiologis membantu menjelaskan bagaimana lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan kampus membentuk preferensi politik individu, sementara pendekatan pilihan rasional menjelaskan bagaimana pemilih pemula menimbang manfaat dan risiko dari setiap kandidat secara kritis. Tipologi pemilih digunakan untuk mengklasifikasikan pola perilaku pemilih berdasarkan orientasi mereka terhadap ideologi dan kebijakan, sehingga dapat memberikan gambaran lebih konkret tentang karakteristik dan kecenderungan pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

1.6.5 Teori Pilihan Rasional

James S. Coleman adalah seorang sosiolog Amerika, pada tahun 1989 Coleman mendirikan jurnal *Rationality and Society*, dengan tujuannya menyebarluaskan pemahaman yang berasal dari perspektif pilihan rasional, dan kemudian di tahun 1990 menerbitkan buku yang berjudul *Foundations of Society Theory* yang juga didasarkan oleh perspektif pilihan rasional. Coleman, menjadi presiden the American

Sociological Association di tahun 1992 dan semakin mendorong kemajuan teori pilihan rasional melalui forum tersebut dan menamainya dengan “*The Rational Reconstruction of Society*”. Coleman, menyatakan bahwa teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro dengan pendekatannya yang dimulai dari metodologi individualisme, untuk kemudian menjelaskan fenomena tingkat makro.⁶⁵

Coleman melihat sistem sosial sebagai sebuah fenomena yang pada tingkat makro harus dijelaskan melalui faktor internalnya, yaitu individu. Ia memandang sistem sosial sebagai kumpulan individu yang, meskipun berbagi sifat dasar manusia yang serupa, tetap menunjukkan perbedaan akibat proses pembentukan oleh masyarakat. Untuk menguraikan mekanisme pembentukan tersebut, Coleman memperkenalkan konsep *modal sosial* sebagai alat analisis penting. Lebih lanjut, dengan pendekatan pilihan rasional, tindakan dan interaksi individu dapat dilihat sebagai fondasi terbentuknya sistem otoritas, kepercayaan, perilaku kolektif, dan aktor kolektif melalui proses integrasi interaksi.⁶⁶

Menurut Coleman, teori pilihan rasional didasari oleh pemikiran bahwa “tindakan seseorang selalu mengarah pada suatu tujuan, yang

⁶⁵ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 392-393.

⁶⁶ George Ritzer (ed.), *Encyclopedia of Social Theory*, vol. 1 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2005), hlm. 112.

tujuan dan tindakannya dipengaruhi oleh nilai-nilai atau pilihan (preferensi)”.⁶⁷ Teori Coleman menekankan dua unsur pokok, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya meliputi semua potensi yang dimiliki atau tersedia, baik berupa potensi alamiah seperti sumber daya alam, maupun kemampuan yang melekat pada individu sebagai sumber daya manusia. Sementara itu, aktor adalah individu yang melakukan tindakan. Aktor dipandang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya dengan efektif dalam rangka mencapai tujuan. Ia juga memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan yang didasarkan pada nilai-nilai dasar dan pertimbangan yang matang. Selain itu, aktor memiliki kuasa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan sesuai dengan kehendaknya. Di lain pihak, sumber daya merupakan elemen yang berada di bawah kendali aktor dan menjadi bagian penting dalam upaya mencapai kepentingan.⁶⁸

Coleman juga menjelaskan proses interaksi antara aktor dan sumber daya yang akhirnya menghasilkan sebuah sistem sosial. Sistem sosial paling sederhana terdiri dari dua aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang diminati pihak lainnya. Kedua aktor memiliki tujuan dan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan

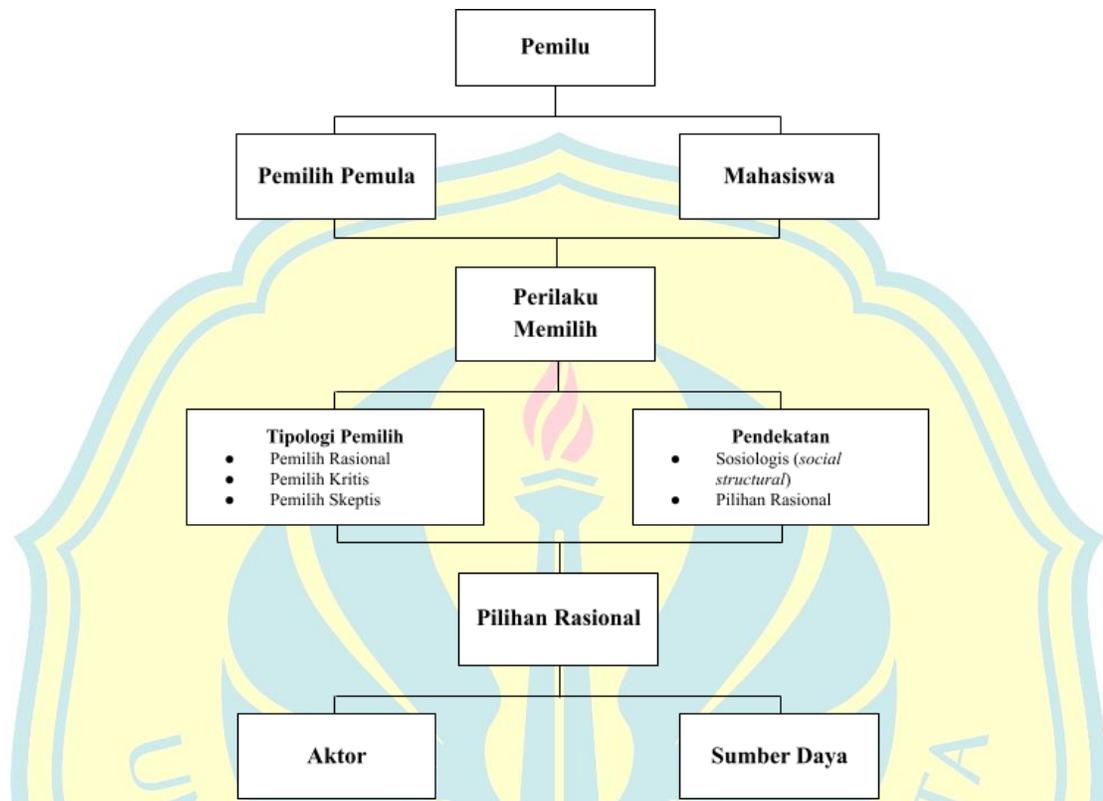
⁶⁷ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 394.

⁶⁸ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012) hlm. 85.

mereka, sehingga tercipta relasi saling ketergantungan di antara tindakan-tindakan tersebut. Namun demikian, Coleman menyadari bahwa individu dalam kenyataan tidak selalu berperilaku secara rasional.⁶⁹ Salah satu langkah penting dalam memahami hubungan mikro ke makro adalah dengan mengakui adanya hak atau wewenang yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Ketika seseorang tunduk pada wewenang orang lain, terbentuklah sebuah hubungan subordinasi, di mana seorang individu mungkin lebih fokus pada kepentingan pihak lain atau kelompok daripada kepentingan pribadinya. Ini menciptakan unit tindakan kolektif yang independen dari individu, di mana struktur sosial mulai berfungsi secara terpisah dari tindakan individu.

⁶⁹ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), hlm. 480.

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Dikonseptualisasi dari Temuan Penelitian

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi serta memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah-masalah sosial maupun kemanusiaan.⁷⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian naratif. Pendekatan dan jenis penelitian

⁷⁰ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: SAGE Publication, 2009), hlm. 22.

ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam pengalaman, pemaknaan, dan cerita dari para informan tentang proses pengambilan keputusan politik mereka sebagai pemilih pemula. Jenis penelitian naratif dipakai dalam penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada cerita dan pengalaman hidup informan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Penelitian naratif memungkinkan peneliti merekam, meyusun, dan menganalisis cerita-cerita informan, untuk melihat bagaimana pengalaman, latar belakang keluarga, lingkungan informan, dinamika kampus, maupun interaksi sosial lainnya membentuk rasionalitas dan pilihan politik pertama mereka sebagai pemilih pemula. Melalui jenis penelitian naratif, peneliti tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik secara umum, tetapi juga memahami bagaimana para informan memaknai pengalaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

1.7.2 Subjek Penelitian

Pemilihan subjek dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yakni dengan menentukan informan yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 yang merupakan pemilih pemula dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan latar belakang akademik dan pengalaman dalam menggunakan hak pilih untuk

pertama kalinya pada pemilu tersebut. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menerapkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Subjek merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021.
2. Subjek berstatus sebagai pemilih pemula, yaitu individu yang menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
3. Subjek bersedia memberikan informasi yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Sehingga penelitian ini akan dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Lokasi penelitian ini dipilih karena relevan dengan tema penelitian. Fakultas Ilmu Sosial secara spesifik dipilih karena mahasiswanya yang memungkinkan memiliki pengetahuan akademik yang relevan dengan isu-isu sosial dan politik. Namun, penelitian ini akan memungkinkan dilakukan diluar lokasi tersebut, karena menyesuaikan dengan kesediaan informan.

Penelitian ini dilakukan secara luring atau tatap muka dan daring atau online, untuk menjangkau para informan. Untuk pengumpulan data secara luring, wawancara dilakukan di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta,

khususnya di area Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Lokasi wawancara juga dipilih berdasarkan kenyamanan dan keamanan informan. Selain luring, penelitian dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan Whatsapp, untuk menjangkau dan menyesuaikan ketersediaan informan. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu tertentu yang dimulai dari September 2024 hingga April 2025 untuk mengumpulkan data yang cukup dan relevan serta mencakup periode setelah pelaksanaan pemilu 2024. Sehingga memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman pemilih pemula secara lebih utuh dan aktual.

1.7.4 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran dalam melaksanakan penelitian dan menyajikan hasil penelitian. Peneliti berperan sebagai pengumpul, pengolah, dan penganalisis data. Peneliti bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan penelitian sesuai dengan pendekatan yang telah dirancang, mulai dari tahap perencanaan hingga penulisan akhir. Peneliti bertanggung jawab dalam merencanakan penelitian secara sistematis. Kemudian, peneliti berperan dalam pengumpulan data. Setelah data terkumpul, peneliti melanjutkan dalam menganalisis data dan menginterpretasikan temuan penelitian. Di tahap akhir, peneliti berperan menyusun penulisan penelitian secara sistematis dan jelas. Peneliti memastikan bahwa hasil penelitian disajikan dengan data-data yang valid, objektif, dan dijelaskan secara

terperinci. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting dan strategis dalam penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁷¹ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan triangulasi data.

1.7.5.1 Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan panduan pertanyaan tetapi tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan atau menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan arah pembicaraan dan respon informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive atau bertujuan, yaitu dengan memilih informan yang memenuhi kriteria tertentu dan dianggap memiliki pengalaman atau informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informan yang dipilih adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 104.

Hukum Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 yang merupakan pemilih pemula pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Wawancara dilakukan secara luring dan daring dengan menyesuaikan waktu informan, selain itu dilakukan dengan penyesuaian gaya komunikasi yang nyaman bagi informan. Peneliti tetap menjaga alur wawancara agar tetap terbuka dan fleksibel. Hal ini dilakukan guna mendapat jawaban yang lebih mendalam dan reflektif.

1.7.5.2 Observasi

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melengkapi cerita-cerita informan dengan mencatat perilaku, interaksi, dan aktivitas mahasiswa sebagai pemilih pemula. Observasi dilakukan secara semi-terstruktur di lingkungan kampus dan media sosial untuk melihat bagaimana mereka merespons dan berpartisipasi dalam isu-isu politik. Peneliti memperhatikan cara mahasiswa berinteraksi, berbicara tentang politik, dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pandangan politik mereka. Observasi ini membantu menggambarkan bagaimana pengalaman mahasiswa tersebut membentuk rasionalitas mereka dalam menentukan pilihan politik.

1.7.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu pelengkap penting dalam teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, yang dapat

meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen yang relevan untuk pendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilpres 2024 serta perilaku pemilih muda khususnya dari kalangan pemilih pemula. Dokumen yang dikaji meliputi data-data resmi dari KPU terkait daftar pemilih tetap (DPT) hingga laporan riset nasional. Dokumentasi tersebut menjadi pelengkap dan penguat dalam penelitian ini.

1.7.5.4 Studi Pustaka

Dalam penelitian, studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun, membaca, mencatat, serta mengolah sumber-sumber pustaka yang relevan.⁷² Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber bacaan seperti, buku, jurnal, artikel, berita *online* yang relevan dengan penelitian. Dengan melakukan studi pustaka membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan menelaah berbagai

⁷² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

referensi yang berkaitan dengan rasionalitas politik, pemilih pemula, generasi Z, perilaku memilih, dan teori pilihan rasional. Peneliti juga mengkaji data sekunder dari lembaga survei untuk memahami komposisi pemilih berdasarkan generasi dan usia serta kecenderungan sosial-politik generasi muda dalam konteks pemilu 2024.

1.7.5.4 Teknik Analisis Data

Proses analisis data berlangsung secara interaktif dan terus berlanjut hingga tuntas, sampai tidak ditemukan lagi data baru atau data telah mencapai kejenuhan.⁷³ Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data dengan merangkum, memilah, dan memfokuskan data mentah yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Peneliti menyaring data berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan untuk mempermudah data sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan data disajikan pula dalam bentuk visual berdasarkan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, pada tahap kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola temuan yang telah teridentifikasi selama proses reduksi data

⁷³ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 133.

dan penyajian data. Selain itu, kutipan langsung dari informan digunakan untuk mendukung pemaparan dan memberikan bukti temuan lapangan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, guna memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mewakili data yang diperoleh di lapangan.

1.7.6 Triangulasi

Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai teknik pengumpulan data dan menggunakan sumber data yang beragam.⁷⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber sebagai bagian dari upaya memastikan kredibilitas data yang diperoleh melalui wawancara. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang disampaikan oleh informan utama yang memiliki karakteristik yang beragam. Para informan utama berasal dari sebelas program studi yang berbeda di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, dengan latar belakang pengalaman organisasi, tingkat keaktifan, serta pandangan politik yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika

⁷⁴ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 125.

pemahaman dan pengambilan keputusan politik pemilih pemula secara lebih komprehensif.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan sistematika penulisan pada penelitian ini, struktur penulisan terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini berisi pendahuluan, yang berisi uraian latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian (secara akademis dan praktis), tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Dalam bab ini menguraikan deskripsi tentang gambaran umum pemilih pemula yang berisi deskripsi umum pemilih pemula, identitas sosial pemilih pemula, pandangan politik pemilih pemula, dan karakter politik pemilih pemula. Selain itu, pada bab ini juga membahas khusus mengenai subjek penelitian, yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta sebagai pemilih pemula dan profil informan.

BAB III: Pada bab ini menyajikan hasil temuan penelitian, peneliti menguraikan hasil penelitian, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pemilih pemula, dan temuan-temuan lainnya. Bab ini juga memuat analisis awal pola-pola yang muncul dari data. Bab ini menjelaskan tentang karakteristik sosial pemilih pemula, makna partisipasi politik, pertimbangan rasional dalam memilih,

peran informasi dan media sosial, peran lingkungan sosial serta refleksi kritis pemilih pemula dalam pengalaman politik pertamanya.

BAB IV: Bab ini berisi analisis berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori pilihan rasional oleh James S. Coleman. Peneliti akan menginterpretasikan bagaimana mahasiswa pemilih pemula sebagai aktor memanfaatkan sumber daya secara efektif yang kemudian mempengaruhi keputusan politiknya.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu, dalam bab ini peneliti mengajukan saran maupun rekomendasi untuk kontribusi pengembangan pengetahuan pada penelitian selanjutnya.

